

BAB I

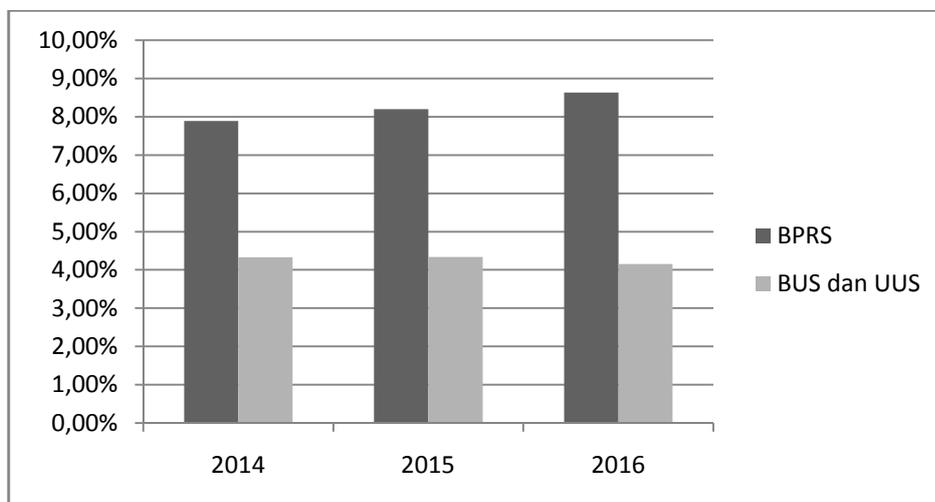
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan Indonesia merupakan sistem yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, *multifinance* dan infrastruktur lainnya yang termasuk dalam sistem pembayaran, maka elemen –elemen sistem keuangan tidak bisa dipandang secara terpisah. Sistem keuangan Indonesia biasanya selalu berinteraksi dengan sistem keuangan global. Tugas utamanya adalah mengalihkan dana (*loanable fund*) dari penabung kepada peminjam untuk kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan dapat meningkatkan standar kehidupan.

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam kelompok negara berkembang, terutama dalam sektor perekonomian. Perekonomian suatu negara merupakan hal yang penting dan sangat berkaitan dengan keberadaan, aktivitas dan peran lembaga perbankan di Negara tersebut. Peran lembaga perbankan yang utama adalah sebagai lembaga intermediasi antar pihak yang memiliki dana lebih (*surplus*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit*) melalui pemberian kredit atau pembiayaan kredit. Kredit yang di berikan bank kepada sektor riil, seperti industri, pertambangan, perumahan, pariwisata dan perhubungan akan berarti bagi perkembangan ekonomi nasional. Fungsi seperti itu sangat dibutuhkan oleh negara berkembang agar perekonomian negara berkembang secara substansial dan terus-menerus.

Sektor perbankan di Indonesia memiliki *dual* sistem yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan pihak bahwa perbankan konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah (Ivana, 2016). Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di Indonesia telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual banking system* yang mendorong pangsa pasar bank – bank syariah (Bank Indonesia, 2002). Perbankan syariah di Indonesia mempunyai berbagai macam lembaga, yaitu Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2017

GAMBAR 1.1
Perbandingan Tingkat NPF BPRS dengan Tingkat NPF BUS dan UUS di Indonesia tahun 2014-2016

Peran yang dimiliki BPRS cukup besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia, terutama pada perkembangan usaha kecil dan

menengah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah BI 2015, jumlah pembiayaan yang dilakukan BPRS untuk usaha kecil dan menengah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk selain usaha kecil dan menengah. Perkembangan secara kuantitas ini belum diikuti dengan perkembangan secara kinerja keuangan Bank Pembiayaan rakyat Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) yang masih tinggi. NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah. Saat ini tingkat NPF BPRS lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat NPF yang ada di Bank Unit Syariah dan Unit Usaha Syariah.

TABEL 1.1
Pembiayaan BPRS Berdasarkan Kualitas Pembayaran Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Kolektibilitas Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016
Lancar	3.334.885	4.145.119	4.610.238	5.292.330	6.087.260
%	93,85	93,29	92,11	91,80	91,37
Non Lancar	218.635	288.373	395.671	472.841	575.296
%	6,15	6,49	7,91	8,20	8,63
a. Kurang Lancar	72.806	90.581	136.251	134.512	109.241
b. Diragukan	51.649	65.874	81.069	95.060	100.645
c. Macet	94.180	131.954	177.351	234.269	365.409
Total Pembiayaan	3.553.520	4.443.492	5.004.909	5.765.171	6.662.556

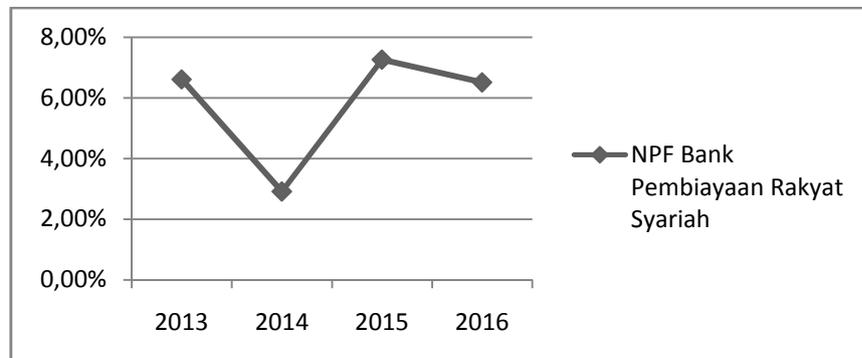
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2017

Pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan merupakan Jumlah total pembiayaan yang dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet (Tabel 1.2). Tingkat *Non Performing Financing* diperoleh dengan perbandingan antara

jumlah total pembiayaan yang bermasalah dengan total biaya yang disalurkan. Tingkat *non performing financing* memiliki presentase cukup tinggi. Hal tersebut dapat berdampak buruk pada tingkat kesehatan bank. Tingkat NPF BPRS berada di atas standar kesehatan bank yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 5%. Dapat dilihat peningkatan NPF BPRS pada tahun 2012-2016. Tingkat NPF tersebut harus dikendalikan karena merupakan salah satu indikasi dalam melihat tingkat kesehatan BPRS, yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada lembaga perbankan. *Non Performing Financing* yang semakin tinggi dapat menyebabkan menurunnya keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan BPRS. Melihat pentingnya peran BPRS dalam perkembangan perekonomian Indonesia, sangat perlu bagi lembaga keuangan untuk memperhatikan tingkat NPF yang tinggi tersebut. Karena dapat dipastikan akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian yang berada pada suatu negara. Sektor perekonomian akan sangat berpengaruh pada keberadaan lembaga perbankan guna sebagai penyedia modal usaha.

Hal ini juga terjadi di BPRS yang berada di daerah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah justru mengalami tingkat NPF yang cukup tinggi. Sehingga mempengaruhi kinerja lembaga keuangan tersebut. Dapat diketahui peningkatan persentase *non performing financing* pada BPRS di Jawa Tengah yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 tingkat *non performing financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Tengah pada level 6,61 % kemudian mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebanyak 2,91 % pada tahun 2014

dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,26% serta mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 sebesar 6,51%.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah , OJK ,2017

GAMBAR 1.2

Tingkat NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah

Situasi ini sangat berkaitan erat dengan profitabilitas lembaga keuangan seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang sampai sekarang mengambil peran aktif sebagai penyedia modal usaha di Provinsi Jawa Tengah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki tujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat islam, terutama pada masyarakat dengan ekonomi lemah. Maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sangat berpengaruh pada berjalannya sektor – sektor ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah menyeluruh ke semua sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah diantaranya sektor pertanian, perkebunan dan sarana pertanian; pertambangan; perindustrian; listrik gas dan air; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi; jasa usaha; jasa sosial/masyarakat dan lain lain.

TABEL 1.2
 Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi di
 Provinsi Jawa Tengah (Milyar Rupiah) Tahun 2013-2016

Sektor	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Pertanian Kehutanan Dan Sarana Pertanian	61	25.188	24.987	34.025
Pertambangan	7	474	559	744
Perindustrian	157	7.275	8.441	9.331
Listrik Gas Dan Air	14	960	1.048	1.940
Konstruksi	177	75.719	83.196	116.547
Perdagangan Restoran Dan Hotel	1.120	136.574	152.014	174.417
Pengangkutan Pergudangan Dan Komunikasi	39	14.122	9.700	9.528
Jasa Dunia Usaha	2.792	22.381	37.860	59.538
Jasa Sosial / Masyarakat	986	49.635	58.127	71.430
Lain Lain	5.334	145.556	184.409	235.981

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2016

Pembiayaan pada sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 kemudian ada kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Sektor perdagangan, konstruksi dan pertanian mendominasi pembiayaan BPRS yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Tingkat NPF yang tinggi yang mempengaruhi kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang dapat berpengaruh pada pembiayaan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembiayaan yang ditujukan ke sektor-sektor ekonomi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga melakukan pembiayaan pada sektor mikro. Seperti pembiayaan pada Usaha Mikro dan Menengah, yang mampu

mengembangkan perekonomian di golongan masyarakat ekonomi lemah dan dapat melaksanakan tujuan dari BPRS tersebut.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang semakin kompleks, berpotensi meningkatkan resiko profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sejalan dengan hal tersebut kita semua harus mempelajari setiap aspek yang mempunyai kaitan dengan pembiayaan bermasalah dan tingkat likuiditas lembaga keuangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, faktor tersebut bisa dari luar maupun faktor internal dari bank tersebut.

Salah satu variabel eksternal perbankan yang mempengaruhi NPF adalah inflasi. Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kenaikan harga – harga secara tajam yang berlangsung terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama kemudian diikuti dengan merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Tingginya kenaikan harga – harga dan tingginya jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat resiko dalam pembiayaan , karena pada saat jumlah uang yang beredar semakin besar menyebabkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat dan memungkinkan terjadinya kredit macet (Ivana, 2016). Variabel eksternal ini mengacu pada keadaan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Faktor internal BPRS yang digunakan dalam penelitian ini adalah BOPO, BOPO merupakan perbandingan antara total biaya dengan total pendapatan. BOPO diukur secara kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi. Sehingga sebagai faktor yang mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan seperti BPRS di Provinsi Jawa

Tengah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor ekonomi maupun usaha kecil dan menengah masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti akan menguji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi *non performing financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah yang tercatat pada tahun 2011-2015. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan perbankan tahun 2011-2015 berupa data statistik mengenai perbankan (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah) yang di publikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data sekunder diambil melalui situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk di olah , sehingga mendapatkan hasil analisa dari pengaruh faktor eksternal dan faktor internal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah. Faktor variabel eksternal yaitu inflasi dan PDRB(Produk Domestik Regional Bruto), sedangkan variabel internal yaitu BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap *Non Performing Financing*. Sehingga bisa meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dan dapat menilai kondisi sebuah lembaga keuangan yang baik serta terhindar dari potensi risiko kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam latar belakang diatas, penulis akan meneliti pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap *non performing financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan judul **“ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF)**

PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015”

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah penelitian ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan Inflasi, PDRB, BOPO dan DPK. Analisis yang digunakan terbatas pada 14 BPRS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi Provinsi Jawa Tengah, sedangkan PDRB terfokus pada PDRB Kabupaten/Kota tempat BPRS yang di teliti.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel inflasi berpengaruh terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh variabel PDRB terhadap NPF Bank pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh variabel BOPO terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh variabel DPK terhadap NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah?

5. Bagaimana variabel faktor eksternal (inflasi dan PDRB) dan faktor internal (BOPO dan DPK) secara bersamaan berpengaruh terhadap *non performing financing*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah
5. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Tengah secara bersamaan terhadap NPF

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mampu memberikan peranan teoritis yang baik terhadap kelangsungan dalam proses penilaian dan bahan evaluasi kinerja keuangan sebagai alat ukur kesehatan bank serta dapat menjadi sebuah

bahan rekomendasi oleh lembaga keuangan atau pemilik modal dalam merumuskan dan menentukan kebijakan keuangan selanjutnya.

2. Penelitian ini menjadi pengetahuan bagi praktisi keuangan agar mampu mengembangkan secara optimal dan efisien. Masyarakat dan praktisi keuangan mampu membuat pertimbangan dalam memilih lembaga keuangan yang sehat juga memberi keuntungan yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

